



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.



Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Ketiga

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Keempat

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Kelima

: Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Keenam

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;

Ketujuh

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 11 Juli 1991



H. MUNAWIR SJADZALI

T e m b u s a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepuslitbang Agama/Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

NO. PROVINSI	NOMOR Urut. Sek.	NAMA SEKOLAH	KAB / KOTA	PERUBAHAN DARI
11 NUSA TENGGARA BARAT	19.	1. Madrasah Tsanawiyah Negeri Selong	Kabupaten Lombok Timur	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mataram Filial Selong
	20.	2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kandai II Dompu	Kabupaten Dompu	Madrasah Tsanawiyah Negeri Blim I Filial Kandai II Dompu.
	21.	C. MADRASAH ALIYAH		
	22.	1. Madrasah Aliyah Negeri Cililincing	Kota Jakarta Utara	Madrasah Aliyah Negeri Grogol Filial Cililincing
12 JAWA BARAT	23.	1. Madrasah Aliyah Negeri Cigugur	Kabupaten Kuningan	Madrasah Aliyah Negeri Babakan Cigugur Cirebon Filial Cigugur
	24.	2. Madrasah Aliyah Negeri Cijerah	Kota Bandung	Madrasah Aliyah Negeri Cililincing Filial Ci- jerah Kota Bandung
	25.	3. Madrasah Aliyah Negeri Cihideung Cimanuk	Kabupaten Pangelegang	Madrasah Aliyah Negeri Serang Filial Ci- hideung Cimanuk
	26.	4. Madrasah Aliyah Negeri Pelabuhan Ratu	Kabupaten Sukabumi	Madrasah Aliyah Negeri Pacet Filial Sukabumi.
3 JAWA TENGAH	27.	5. Madrasah Aliyah Negeri Rajagaluh	Kabupaten Majalengka	Madrasah Aliyah Cirebon Filial Rajagaluh Majalengka.
	28.	6. Madrasah Aliyah Negeri Sumedang	Kabupaten Sumedang	Madrasah Aliyah Negeri i Garut Filial Sumedang
	29.	7. Madrasah Aliyah Negeri Indramayu	Kabupaten Indramayu	Madrasah Aliyah Negeri Cirebon Filial Indramayu.
	30.	8. Madrasah Aliyah Negeri Kudus	Kabupaten Kudus	Madrasah Aliyah Negeri i Purwodadi Filial Kudus
MENGETAHUI KEPALA MAN'S CILINCING KOTA JAKARTA BARAT	31.	9. Madrasah Aliyah Negeri Magelang	Kota Magelang	Madrasah Aliyah Negeri Temanggung, Filial Kota Magelang
	32.	10. Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar Klaten	Kabupaten Klaten	Madrasah Aliyah Negeri Surakarta Filial Karanganyar Klaten.
	33.	11. Madrasah Aliyah Negeri Pati	Kabupaten Pati	Madrasah Aliyah Negeri Semarang Filial Pati
	34.	12. Madrasah Aliyah Negeri Pati	Kabupaten Pati	

19650918 199503

